

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2004**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2004 pada unit kerja Kantor Kecamatan Tikung.

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2004 ini penyusunannya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang merupakan wujud pertanggungjawaban secara sistematis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja Kantor Kecamatan Tikung sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Perlu dimaklumi bahwa dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terdapat kekurangan, sehingga untuk kesempurnaan dalam penyusunan laporan dimaksud tahun berikutnya, oleh karena itu harapan akhir dengan melihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), seseorang maupun badan hukum akan dengan mudah untuk mengetahui terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, disampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya apabila adanya saran dan kritik dalam perbaikan ke depan.

Oleh karena itu besar harapan kami semoga dengan pembuatan Laporan yang cukup sederhana ini dapat berguna serta bermanfaat, dan senantiasa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridloi atas pengabdian kita bersama kepada Bangsa dan negara tercinta.



Tikung, 31 Maret 2005

CAMAT TIKUNG

Drs. TURDJI, MM
Penata Tingkat I
NIP. 510 091 495

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK	4
 BAB II RENCANA STRATEJIK	6
A. RENCANA STRATEJIK	6
1. VISI	6
2. MISI	6
3. TUJUAN	6
B. RENCANA KINERJA	7
1. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	7
2. PROGRAM	8
3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN	9
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. PENGUKURAN KINERJA	10
B. EVALUASI KINERJA	10
C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	13
D. AKUNTABILITAS KAEUANGAN	13
 BAB IV PENUTUP	15
 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, khususnya azas akuntabilitas telah dirumuskan bahwa dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Kecamatan Tikung sesuai dengan kedudukannya adalah sebagai perangkat daerah dan seiring dengan azas dekonsentrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, wajib untuk memberikan laporan pelaksanaan tugas kegiatannya sebagaimana yang telah dibakukan dalam rencana Strategik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah yang lebih atas yang dalam hal ini adalah Bupati Lamongan dalam setiap tahun, yang tidak lain adalah suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mepertanggungjawabkan tentang keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tikung adalah berada dibagian selatan wilayah Kabupaten Lamongan dalam peranannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2000 tentang organisasi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan disamping itu berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kabupaten Lamongan bahwa Kecamatan adalah sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS POKOK

Dalam membantu Kepala Daerah untuk menjalankan sebagaimana kewenangan yang diampahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

2. FUNGSI

- a. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah yang terpadu ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan ;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ;
- e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Sebagai upaya dalam pencapaian misi terdapat hal-hal yang mendukung serta kemungkinan gagalnya misi dimaksud. Dalam kaitan tersebut dapat dikelompokkan

sebagai berikut :

1. KEKUATAN :

- a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi kecamatan Kabupaten Lamongan ;
- b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat ;
- c. Jumlah Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan relatif memadai ;
- d. Sarana dan prasarana kerja memenuhi syarat ;
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat cukup tinggi ;
- f. Terbentuknya cabang dinas/Instansi dan UPT dinas di Tingkat Kecamatan ;
- g. Tersedianya unsur penyelenggara Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di seluruh desa.

2. KELEMAHAN

- a. Sumber Daya perangkat Daerah relatif belum seimbang sesuai dengan tuntutan era global ;
- b. Sumber daya Penyelenggara Pemerintahan Desa relatif masih rendah ;
- c. Standart mentalitas Pamong Praja belum ada ;
- d. Masih adanya rasa egoisme sektoral Cabang Dinas/ Instansi, maupun UPT Dinas ;
- e. Kesejahteraan PNS dan unsur aparat Pemerintahan Desa relatif rendah.

3. TANTANGAN / ANCAMAN

- a. Tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan semakin tinggi ;
- b. Penyelenggara Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- c. Pelayanan yang prima ;
- d. Globalisasi.

BAB II

RENCANA STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIK :

Yaitu berisikan langkah yang akan diambil/dilakukan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung agar mampu dalam menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional maupun global dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan Perencanaan Strategik yang jelas dan sinergis, Kecamatan Tikung dengan Visi dan Misinya yang diselaraskan dengan potensi yang tersedia, sedangkan peluang yang ada serta kendala-kendala yang dihadapi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

1. VISI

Yaitu berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus di bawa dan diarahkan agar mampu berkarya secara konsisten serta tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Kecamatan Tikung adalah :

• **TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKESINAMBUNGAN** .

2. MISI

- a. Peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan ;
- b. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Desa ;
- c. Peningkatan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan ;
- d. Peningkatan kesejahteraan sosial ;
- e. Pemantapan ketenteraman dan ketertiban.

3. TUJUAN

- a. Terwujudnya administrasi di sekretariat Kecamatan yang baik dan valid ;
- b. Terselenggaranya peningkatan Pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa ;
- c. Terlaksananya koordinasi perekonomian dan pembangunan ;

- Suatu proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung dengan melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja dimaksud telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Sedangkan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dan merupakan komitmen bagi Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung untuk mencapainya dalam tahun 2004.
- 1. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN**
- Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan Tikung dengan indikator sasaran :
 - Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ;
 - Jumlah laporan barang inventaris daerah ;
 - Jumlah laporan kepegawaian ;
 - Pembinaan administrasi umum ;
 - Pengiriman peserta didik.
 - Terciptanya koordinasi yang baik dengan Cabdin dan Pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan dengan indikator sasaran :
 - Jumlah rapat koordinasi dengan Muspika, Kacabdin/Instansi, UPT Dinas ;
 - Jumlah rapat kerja dengan Kades, BPD, LPM dan Perangkat Desa ;
 - Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan desa.
 - Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat dengan indikator sasaran :

C. RENCANA KINERJA

- Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat ;
- Terwujudnya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

1. Jumlah rapat koordinasi dengan Kkacabdin/Instansi, UPT Dinas dan Kades, BPD, LPM dan tokoh Masyarakat ;

2. Frekuensi pembinaan, pengawasan pelaksanaan pembangunan ;
3. frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ;

4. Intensitas pembinaan lembaga perekonomian, pengusaha kecil dan menengah.

- d. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran :

1. Frekuensi pemantauan pendistribusian RASKIN ;

2. Terselenggaranya dan kompensasi kenaikan BBM lepat sasaran.

- e. Tercapainya peningkatan ketertarikan dan ketertarikan masyarakat dengan indikator sasaran :

1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan Aparat keamanan ke desa ;

2. Frekuensi operasi kepemilikan IMB, Ijin Usaha / HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kecamatan Tikung ;

3. Optimalisasi Pelumasan PBB dan Retribusi Daerah.

2. PROGRAM :

- a. Pelayanan administrasi kesekretariatan ;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ;

- c. Pelaksanaan dan pengadeministrasian Rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengadeministrasian distribusi beras bagi KK miskin (RASKIN) maupun PKSBBM ;

- e. Pemantauan situasi dan kondisi ketertarikan dan ketertarikan Kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

3. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN :

- a. Pengurusan administrasi ketelausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga :
 1. Jumlah surat masuk dan keluar ;
 2. Jumlah laporan kepegawaian ;
 3. Jumlah barang inventaris yang dilaporkan.
- b. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa :
 1. Rapat koordinasi dengan Muspika, Cabdin/Instansi, UPT Dinas se Kecamatan Tikung ;
 2. Rapat kerja dengan Kades dan Perangkat desa, BPD dan LPM ;
 3. Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan LKPJ Kepala Desa.
- c. Pengurusan Rapat Koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan :
 1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Muspika, Kacabdin/Instansi dan UPT Dinas se Kecamatan Tikung ;
 2. Jumlah Laporan pelaksanaan / kegiatan pembangunan ;
 3. Frekwensi pembinaan lembaga perekonomian usaha kecil dan menengah (UKM).
- d. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN dan PKSBBM :
 1. Frekwensi pemantauan distribusi beras bagi KK miskin (RASKIN) dan kompensasi kenaikan BBM (PKS BBM) ;
 2. Pelaporan penerima RASKIN dan PKSBBM.
- e. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi kelenyamanan dan keterlibatan maupun penegakan Peraturan Daerah :
 1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa ;
 2. Frekwensi operasi keamanan IMB, Ijin usaha/ Ho dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Tikung ;
 3. Optimalisasi pelayanan PBB dan retribusi daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Didalam pengukuran kinerja tidak terlepas dari faktor faktor internal maupun faktor eksternal yang ada di Kecamatan Tikung. Faktor Internal diantaranya meliputi jumlah, SDM Perangkat daerah yang ada di sekretariat Kecamatan Tikung, sarana dan prasarana kerja maupun dukungan dana. Adapun faktor eksternal meliputi antara lain jumlah dan SDM dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, tuntutan masyarakat maupun era globalisasi.

Dalam pengukuran kinerja unit kerja Kantor Kecamatan Tikung pada tahun 2004 dapat dilihat secara rinci pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

B. EVALUASI KINERJA

Untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai misi selama Tahun 2004, sehingga dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Terhadap pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dengan indikator meliputi jumlah surat masuk dan keluar, jumlah laporan Kepegawaian dan jumlah barang inventaris yang dilaporkan kesemuanya telah dapat dilaksanakan walaupun kadang-kadang pelaporannya agak terlambat. Guna mengatasi kekurangan dan kelemahannya dibawah koordinasi sekretaris Kecamatan untuk mengoptimalkan staf yang ada di setiap seksi-seksi lainnya. Dalam pengiriman peserta DIKLAT guna peningkatan SDM telah dilaksanakan sesuai dengan alokasi.

2. Terhadap pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa dengan indikator meliputi pelaksanaan rapat koordinasi dengan Muspika, Kepala Cabang Dinas/Instansi, UPT Dinas se Kecamatan Tikung, pelaksanaan rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), secara periodik sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Tikung. Dalam fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, selama ini memang aktif telah kami lakukan dengan cara memberikan contoh-contoh kepada Pemerintah Desa maupun dengan melalui pembinaan ke desa-desa. Dengan cara seperti tersebut walaupun hasilnya kurang memuaskan, tetapi dari unsur pemerintahan desa sudah dapat memahami serta menyadari tentang arti penting Peraturan Desa yang merupakan landasan berpijak didalam mengelola Pemerintahan Umum di desa. Kendala-kendala yang dijumpai disamping kwalitas Sumber daya Aparat Penyelenggara Pemerintahan Desa yang masih relatif belum sejalan dengabn makna dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hal lainnya dengan keterbatasan sarana dan prasarana teknis yang memadai.
3. Terhadap pengurusan Rapat Koordinasi dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan Pengawasan pembangunan, dengan indikator yang meliputi frekwensi rapat koordinasi pembangunan dengan Cabdin/ Instansi, UPT Dinas dan Kepala Desa se Kecamatan Tikung, jumlah Laporan Kegiatan pembangunan dan frekwensi pembinaan perekonomian Usaha kecil dan Menengah (UKM). Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut selama tahun 2004 telah dilaksanakan rapat koordinasi Pengawasan Pembangunan. Dalam kegiatan rapat/musyawarah selama ini dapat berjalan cukup baik serta secara rutin hasilnya dilaporkan kepada Bupati Lamongan. Walaupun masih dijumpai dari usulan yang kami ajukan, yang mana usulamn dimaksud hasil rekapitulasi usulan dari bawah (Bottom Up Planning) tetapi tidak seluruhnya terealisasi. Terkait dengan permasalahan yang ada kami sangat menyadari dan memahami kemungkinan karema menyesuaikan dengan terbatasnya keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan. Adapun terkait dengan pembinaan kepada

UKM secara insidental telah kami lakukan sesuai dengan kemampuan anggaran. Sedangkan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara rutin dilaporkan kepada Bupati Lamongan sesuai dengan kenyataan di lapangan...

4. Terhadap pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN dan PKSBBM dengan indikator frekuensi pemantauan penyaluran RASKIN dan PKSBBM, Pelaporan penerima RASKIN dan PKSBBM. Sedangkan fasilitasi distribusi RASKIN yang diterima setiap bulan sebanyak 20 kg telah berjalan dengan lancar dan baik. Sedangkan jumlah KK kategori miskin penerima beras bersubsidi se Kecamatan Tikung selama tahun 2004 sebanyak = 36.180.000 kg. Sedangkan penentuan dana yang berasal dari PKSBBM selain beras bagi KK miskin di atas, juga antara lain sasaran pendidikan dan kesehatan telah tersalur kepada yang berhak menerima dengan melalui Cabang Dinas/Instansi maupun UPT dinas di Kecamatan Tikung, berkaitan dengan kegiatan tersebut dalam koordinasi dan pengawasan kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001.

5. Terhadap pengurusan pemantauan situasi dan kondisi ketenteraman dan keterlibatan maupun penegakan peraturan daerah, dengan indikator yang meliputi antara lain pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan terkait ke desa, frekuensi pemantauan kepemilikan IMB, Ijin Usaha/HO dan sejenisnya di perusahaan-perusahaan se Kecamatan Tikung dan Intensifikasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta retribusi daerah. Dalam pemantauan situasi dan kondisi ketenteraman dan keterlibatan masyarakat secara rutin telah dilakukan ke desa-desa di Kecamatan Tikung bersama dengan aparat keamanan terkait (Koramil dan Polsek). Kaitan dengan kondisi yang ada saat ini bahwa satu kendala yang ada di lingkungan masyarakat yaitu menurunnya aktivitas penijaksanaan keamanan lingkungan (KAMLING) di setiap desa. Upaya yang kami tempuh dalam peningkatan jaga keamanan lingkungan setiap rapat kerja Kepala Desa dan Perangkat desa dilakukan kembali. Sedangkan upaya dalam pelaksanaan PBB dari jumlah Baku tahun 2004 sebesar Rp. 206.593.071,- (dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh

satu rupiah) dapat lunas sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2004 dengan program kegiatan dan sasaran yang telah dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, maka kami berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara maksimal mungkin berupaya untuk mewujudkan tercapainya good governance di unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung. Beberapa upaya dimaksud kami mengakui dan menyadari keterbatasan kemampuan sehingga belum dapat memuaskan semua pihak. Adapun beberapa kendala yang kadang terjadi selama tahun 2004, antara lain dapat dirumuskan :

1. Masih ada rasa egoisme sektoral Cabdin/Instansi UPT Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga dengan kondisi seperti ini akan berdampak pada sinkronisasi tujuan akhir pembangunan ;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan Tikung ;
3. Terbatasnya SDM unsur Perangkat Desa ;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja unsur Pemerintahan Desa ;
5. Adanya masa transisi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun disempurnakan ke Undang-undang nomor 32 Tahun 2004

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada dasarnya dana yang digunakan di Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung selama tahun anggaran 2004 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu pendanaan ini dalam pengadministrasiannya/DASK-nya pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dalam pertanggungjawabannya (LAKIP) nya sudah menjadi satu di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun yang berupa dana-dana pembangunan

baik yang disalurkan ke desa dan PKSBBM dalam pengelolaanya melalui Dinas/Kantor maupun Unit kerja di Tingkat Kabupaten Lamongan, termasuk pembuatan LAKIP nya. Sedangkan dana sebagaimana yang kami laporkan dalam pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada LAKIP ini merupakan sumber dana secara swadaya khusus di Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung.

BAB IV

PENUTUP

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja

Kantor kecamatan Tikung di buat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 07 Tahun 1999, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya masing-masing dalam rangka upaya menuju terciptanya good governance dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Pejabat yang memberikan tugas. Sehubungan dengan hal itu Pertanggungjawaban yang mampu kami uraikan adalah sebagai bentuk Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Kantor Kecamatan yang mempunyai kewenangan diatur sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Sehingga selama Tahun Anggaran 2004 Unit Kerja Kantor Kecamatan Tikung dapat melakukan beberapa kegiatan sebagai sarana guna mencapai misi organisasi, walaupun di dalam pelaksanaannya telah melalui perhitungan dan koordinasi yang mantap serta berkesinambungan namun masih kurang memuaskan semua pihak.

Menyadari dari pengalaman dan kekurangan yang telah terjadi dalam Tahun Anggaran 2004, akan dapat kami jadikan bahan perubahan dalam berbuat yang lebih baik pada Tahun Anggaran 2005, dengan harapan terwujudnya tujuan good governance yang mantap.

Tikung, 20 Maret 2005
CAMBAT TIKUNG
Drs. TURDUI, MM
Penata Tingkat I
NIP. 510 091 495



LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2004

Instansi : Kecamatan Tikung

Visi : TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKESINAMBUNGAN

Formulir RS

- Misi :
- a. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN ;
 - b. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA ;
 - c. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ;
 - d. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ;
 - e. PEMANTAUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan.	1. Terwujudnya tertib administrasi umum di sekretariat. Kecamatan Tikung	- Jumlah surat yang ditangani (surat masuk dan keluar) - Jumlah barang inventaris yang dilaporkan - Frekwensi laporan kepegawalan - Pengiriman peserta diklat.	Meningkatkan pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban	1. Pelayanan administrasi kesekretariatan ;	Karena terjadi ketidak sesuaian dengan RENSTRA Kec. Tikung tahun 2002-2006 sehingga dengan petunjuk yang baru dalam penyusunan LAKIP, maka pembuatan LAKIP perlu disesuaikan, sehingga ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kec.
2. Terselenggaranya peningkatan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa.	2. Terciptanya koordinasi yang mantap dengan Dinas/Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam semua pelaksanaan kegiatan.	- Jumlah rapat koordinasi dengan Muspika, Cabdin/Instansi dan UPT Dinas - Jumlah raker dengan Kades, BPD, Perangkat Desa dan LPM. - Jumlah pembinaan administrasi Pemerintah Desa		2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pemerintahan desa;	
3. Terlaksananya koordinasi perekonomian dan pembangunan	3. Terselenggaranya koordinasi pembangunan yang mantap untuk peningkatan perekonomian masyarakat.	- Jumlah rakor dengan Kacabdin/Instansi, UPT dinas, Kades, BPD dan LPM - Jumlah monitoring/Evaluasi pelaksanaan pembangunan ; - Jumlah pembinaan pada Lembaga Perekonomian, Pengusaha Kecil dan Menengah		3. Pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan rapat koordinasi perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan;	

1	2	3	4	5	6
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat	4. Terciptanya koordinasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.	- Jumlah pemantauan penyaluran RASKIN - Tersalurnya dana kompensasi Kenaikan BBM sesuai dengan sasaran		4. Pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian beras bagi KK miskin dan PKSBBM ;	
5. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah	5. Terciptanya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	- Terlaksananya penjagaan Kamling seluruh desa dan tingkat RT - Jumlah laporan tentang situasi dan kondisi wilayah kecamatan		5. Pemantauan dalam antisipasi situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah.	

Tikung, 31 Maret 2005

CAMAT TIKUNG

Drs. TURJIL, MM
Penata Tingkat I
NIP. 510 091 495

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2004**

Instansi : Kantor Kecamatan Tikung

Formulir RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA SATUAN	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Terwujudnya tertib administrasi Umum di sekretariat Kec. Tikung	- Jumlah surat yang ditangani (surat keluar dan masuk) - Jumlah barang inventaris yang dilaporkan - Frekwensi laporan kepegawalan - Pengiriman peserta diklat	1.934 surat 260 unit 19 kali sesuai dengan alokasi 12 kali	1. Pelayanan administrasi kesekretariatan.	1. Pengurusan administrasi ketatausahaan, kepegawalan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan.	Input : Dana, SDM Output : - Jml surat yang ditangani (masuk dan keluar) - Jml. Barang inventaris yang dilaporkan - Frekwensi laporan kepegawalan	Rupiah/orang Surat Unit Kali	1.554.500,- /4 1.934 260 19	
2. Terciptanya koordinasi yang mantap dengan Cabdin/Instansi dan UPT Dinas, maupun dengan aparat Pemerint. Desa dalam pelaksanaan kegiatan semua bidang.	- Jumlah rapat kordinasi dengan muspika dan Kacbdin/UPT Dinas - Jumlah Raker dengan Kades, BPD dan perangkat Desa - Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan Desa	12 kali 12 kali	2. Pelaksanaan kordinasi penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pemerintahan Desa	2. Pengurusan pemerintahan umum dan fasilitasi pemerintahan desa.	Input : Dana, SDM Output : - Rakor dengan Cabdin/UPT Dinas se Kec. - Raker dengan Kades, perangkat desa, BPD dan LPM - Penyelesaian Perdes dan LPI Kades	Rupiah/orang Kali Kali Buah	3:000.000,- /90 12 12 13	
3. Terselenggaranya koordinasi pembangunan yang mantap dan tepat dalam rangka peningkatkan	- Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi, Kades dan BPD ,LPM - Jumlah monitoring,	4 kali 6 kali	3. Pelaksanaan pengadministrasian rapat koordinasi perencanaan, pelaks. - Pengendalian	3. Pengurusan rapat kordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Input : Dana,SDM Output : - Rakor pemb. Dengan Cabdin/Instansi, UPT Dinas se Kec.	Rupiah/orang Kali	2.000.000,- /80 6	

peningkatan perekonomian masyarakat.	pengawasan pelaksanaan pembangunan		Pengendalian dan pengawasan pembangunan	pembangunan.	- Jml. Pelaporan kegiatan pemb.	Kali	12
	- Jumlah pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan	12 kali			- Jml. Pembinaan pada lembaga perek dan Pengusaha kecil, menengah	Kali	6
4. Terwujudnya kordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Jumlah pembinaan pada lembaga perek, pengusaha kecil dan menengah	6 kali					
	- Jumlah pemantauan penyaluran RASKIN	12 kali	4. Pelaksanaan pengadministrasian penyaluran beras untuk KK miskin maupun PKSBBM	4. Pengurusan dan fasilitasi penyaluran RASKIN dan PKSBBM.	Input : Dana, SDM Output :	Rupiah/orang	3.600.000,- /140
	- Terselurnya kompensasi kenaikan BBM	12 kali			- Jml peman-tauan penya-luran RASKIN dan PKSBBM	Kali	12
5. Terciptanya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	- Terselenggaranya kegiatan jaga Kamling disetiap desa sampai di tingkat RT	12 kali	5. Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan serta penegakan pelak. Perda	5. Pengurusan , peman-tauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban serta penegakan pelaksanaan perda.	- Pelap. Penerima RASKIN dan PKSBBM Input : Dana, SDM Output :	Kali	12
	- Jumlah laporan situasi dan kondisi wilayah kec.	12 kali			- Jml pemantauan Kamtibmas bersama dengan PAM ke desa-desa	Rupiah/orang	3.000.000,- /6
	- Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban ke desa desa	12 kali			- Jml pemeriks kepemilikan IMB, ijin Usaha/HO dll	Kali	36
	- Penegakan pelaksanaan peraturan daerah				- Intensifikasi pelunasan PBB dan Ret. daerah	Kali	12
						Kali	24

Tikung, 31 Maret 2005

BAMAT TIKUNG

Drs. TURDJI, MM

Penata Tingkat I

NIP. 510 091 495

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2004

Instansi : Kantor Kecamatan Tikung

Formulir PKK

PROGRAM	KEGIATAN					PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TK CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENC. TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pelayanan administrasi kesekretariatan.	1. Pengurusan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan perlengkapan serta kerumahtanggaan	Input : Dana,SDM Output :	Rupiah/orang	1.554.500,-/4	1.554.500,-/4	100 %	
		- Jml surat yang ditangani (masuk dan keluar)	Surat	1.934	1.934	100 %	
		- Jml. Barang inventaris yang dilaporkan	Unit	260	260	100 %	
		- Frekwensi laporan kepegawaian	Kali	19	19	100 %	
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa	2. Pengurusan pemerintahan umum dan fasilitasi pada pemerintahan desa	Input : Dana, SDM Output :	Rupiah/orang	3.000.000,-/90	3.000.000,-/90	100 %	
		- Rakor dengan Cabdin/UPT Dinas se Kec.	Kali	12	12	100 %	
		- Raker dengan Kades, perangkat desa, BPD dan LPM	Kali	12	12	100 %	
		- Penyelesaian Perdes dan LPI Kades	Buah	13	13	100 %	
3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan	Input : Dana,SDM Output :	Rupiah/orang	2.000.000,-/80	2.000.000,-/80	100 %	
		- Rakor pemb. Dengan Cabdin/Instansi, UPT Dinas se Kec.	Kali	6	6	100 %	
		- Jml. Pelaporan kegiatan pemb.	Kali	12	12	100 %	
		- Jml. Pembinaan pada lembaga perek dan Pengusaha kecil, menengah	Kali	6	6	100 %	

4. Pelaksanaan dan pengadministrasian penyaluran RASKIN dan PKSBBM	4. Pengurusan dan fasilitasi penyaluran RASKIN dan PKSBBM	Input : Dana, SDM Output : - Jml peman-tauan penyaluran RASKIN dan PKSBBM - Pelap. Penerima RASKIN dan PKSBBM	Rupiah/orang	3.600.000,-/140	3.600.000./140	100 %	
			Kali	12	12	100 %	
			Kali	12	12	100 %	
5. Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan serta penegakan pelaksanaan perda	5. Pengurusan pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban serta penegakan pelaksanaan perda	Input : Dana, SDM Output : - Jml pemantauan Kamtibmas bersama dengan PAM ke desa-desa - Jml pemeriks kepemilikan IMB, Ijin Usaha/HO dll - Intensifikasi pelunasan PBB dan Ret. daerah	Rupiah/orang	3.000.000,-/6	3.000.000,-/6	100 %	
			Kali	36	36	100 %	
			Kali	12	12	100 %	
			Kali	24	24	100 %	



Tikung, 31 Maret 2005

KAMAT TIKUNG

Drs. TURJIL, MM

Penata Tingkat I

NIP. 510 091 495

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2004

Instansi : Kantor Kecamatan Tikung

formulir PPS

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya tertib administrasi Umum di sekretariat Kec. Tikung	- Jumlah surat yang ditangani (surat keluar dan masuk) - Jumlah barang inventaris yang dilaporkan - Frekwensi laporan kepegawaian - Pengiriman peserta diklat	1.934 surat 260 unit 19 kali sesuai dengan alokasi	1.934 surat 260 unit 19 kali sesuai dengan alokasi	100 % 100 % 100 % 100 %	
2. Terciptanya koordinasi yang mantap dengan Cabdin/Instansi dan UPT Dinas, maupun dengan aparat Pemerint. Desa dalam pelaksanaan kegiatan semua bidang.	- Jumlah rapat kordinasi dengan musplka dan Kacabdin/UPT Dinas - Jumlah Raker dengan Kades, BPD dan perangkat Desa - Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan Desa	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %	
3. Terselenggaranya koordinasi pembangunan yang mantap guna peningkatan perekonomian masyarakat.	- Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi, Kades dan BPD ,LPM - Jumlah monitoring, pengawasan pelaksanaan pembangunan - Jumlah pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan - Jumlah pembinaan pada lembaga perek. pengusaha kecil dan menengah	6 kali 12 kali 12 kali 6 kali	6 kali 12 kali 12 kali 6 kali	100 % 100 % 100 % 100 %	
4. Terwujudnya kordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Jumlah pemantauan penyaluran RASKIN - Tersalurnya kompensasi kenaikan BBM sesuai dengan sasaran	12 kali 12 kali	12 kali 12 kali	100 % 100 %	

1	2	3	4	5	6
5. Terciptanya peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat.	- Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa-desa - Jumlah pemeriksaan kepemilikan IMB, Ijin Usaha/HO dan Ijin lainnya ke perusahaan yang ada di kecamatan Tikung - Intensifikasi pelunasan PBB dan retribusi Daerah	12 kali 12 kali 12 kali	12 kali 12 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %	

Tikung, 31 Maret 2005
KAMAT TIKUNG

Drs. TURBIL, MM
Penata Tingkat I
NIP. 510 091 495